

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DI DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU

M. ASRAR AS

105610546515



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DI DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Di Susun Dan Diajukan Oleh

M. ASRAR AS

Nomor Stambuk : 105610 5465 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Kampung
Keluarga Berencana (KB) Di Desa Lipukasi
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : M. ASRAR AS

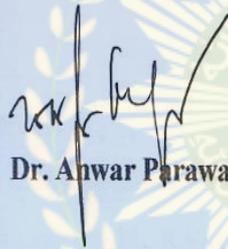
Nomor Stambuk : 10561 05465 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Drs. Ruskin Azikin, MM

Mengetahui:

Dekan

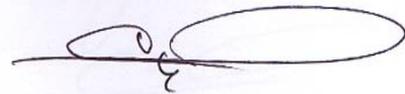
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 27 bulan September tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



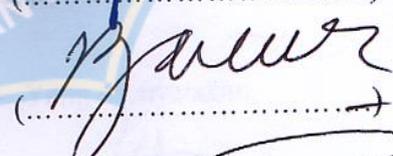
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

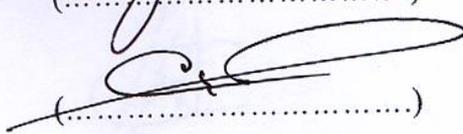
1. Dr. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Drs. Ruskin Azikin, MM
3. Nasrul Haq S.Sos, M.PA
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



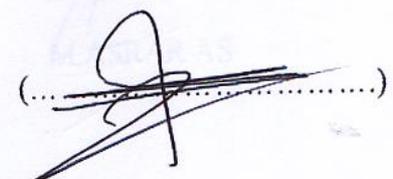
(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. ASRAR AS

Nomor Stambuk : 10561 05465 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, September 2019

Yang Menyatakan,



M.ASRAR AS

ABSTRAK

M. Asrar As. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (di bimbing oleh Anwar Parawangi dan Ruskin Azikin)

Kampung KB Mendapat Perhatian Dan Apresiasi Tinggi Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Pengentasan Kemiskinan. Secara Esensi Kampung KB Merupakan Salah Satu Bentuk Atau Model Miniatur Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKPBK) Secara Utuh Yang Melibatkan Seluruh Bidang Di Lingkungan BKKBN Dan Bersinergis Dengan Kementrian/Lembaga, Instansi Yang Terkait Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Wilayah, Serta Di Laksanakan Di Tingkat Desa/Kelurahan. Kampung KB Berguna Untuk Membantu Program KB Serta Menjaga Kesejahteraan. Berdasarkan Hal Tersebut Peneliti Terdorong Untuk Mencoba Menjelaskan Implementasi Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Tujuan Penelitian Yaitu Mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang adalah Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Kepala Desa Lipukasi, Sekretaris POKJA, Anggota POKJA, dan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknis analisis data dan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yang di gunakan adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah berjalan lumayan baik hal ini dapat di lihat dengan banyaknya program Kampung KB yang terlaksana akan tetapi dalam pelaksanaan terjadi kendala seperti partisipasi masyarakat, anggaran serta komunikasi setiap instansi masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antar instansi serta kurangnya kerjasama antar pelaksana dan instansi terkait yang menyebabkan kegiatan terkendala.

Kata Kunci :Implementasi, Program Kampung KB

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”**. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. M.Asaf Do’a, SH dan Ibunda Hj. Atiapaika tercinta yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ruskin Azikin, MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA atas bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan serta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis
5. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis
6. Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini Kepala Desa Lipukasi yang telah memberikan izin meneliti dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi
7. Untuk ke 10 saudara-saudari saya yaitu Awaluddin As, Akhiruddin As, Muh. Akbal As ST, Asnawi, Asmalia As S.Kep, Astuti As, S.S, Agus Salim As, Muh. Afdhal As, Nur Azizah As dan Ahmad Al Kausar As atas bimbingan, semangat, motivasi, kasih sayang dan bantuannya secara materi. Serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus Kelas G *Old Public Administration* dan Kelas F atas semangat dan kebersamaannya. Untuk sahabat tercinta WIK'S Squad, Kajira Squad dan Hot News Squad yang sudah seperti saudara bagi penulis diperantauan, sahabat dan teman seperjuangan Andi Nur fadillah, Yansar, Site Nurfatieha,

Kasmira, Wahyuningsi Abdullah, Nur Hikmah, Ari Zulfahri, Rezky Prilya Widyastuti dan Muhammad Fajrul atas semangat dan bantuannya serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

9. Yang telah selalu menemani mulai dari awal sampai akhir Charina Charin yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini dengan pahala terbaik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, September 2019



M. ASRAR AS

DAFTAR ISI

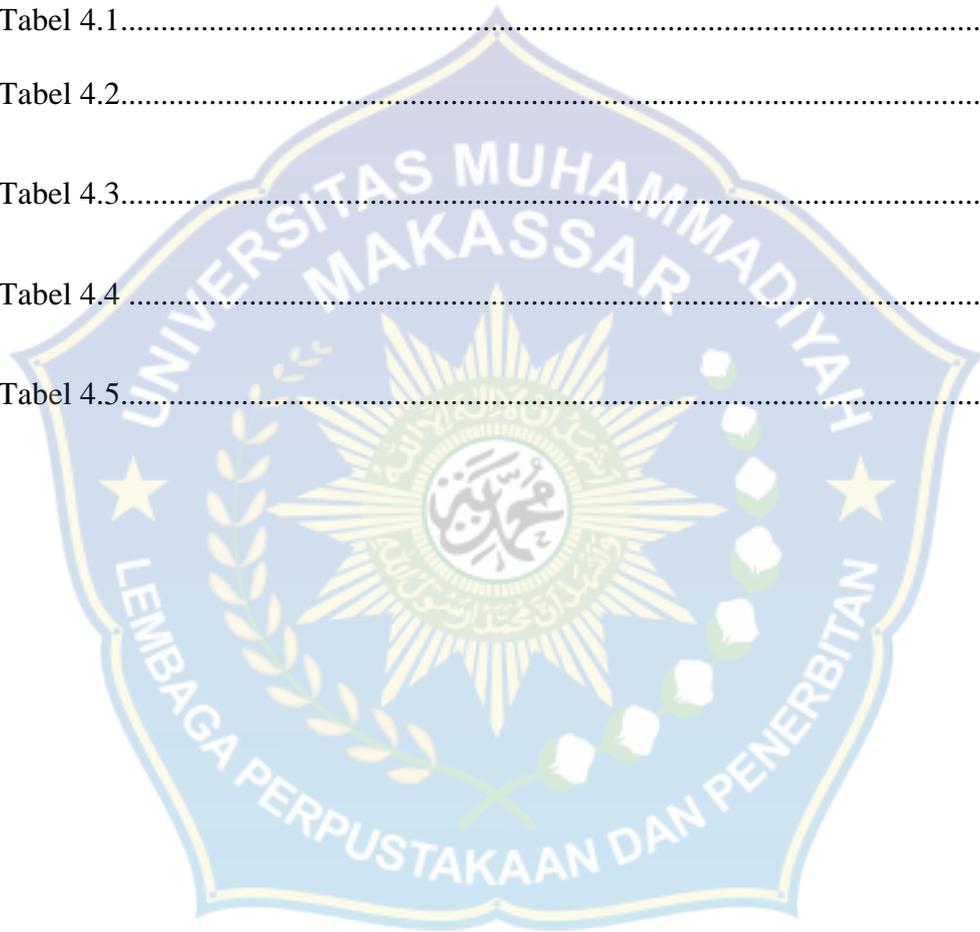
HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN PENGAJUAN	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN	iii	
HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI	iv	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v	
ABSTRAK	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI.....	x	
DAFTAR TABEL.....	xii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	7	
C. Tujuan Penelitian	7	
D. Manfaat Penelitian	8	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian, Konsep Dan Teori	9	
B. Kerangka Pikir	25	
C. Fokus Penelitian.....	26	
D. Deskriptif Penelitian.....	26	
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	28	
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	28	
C. Sumber Data.....	29	
D. Informan Penelitian.....	29	
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30	
F. Teknik Analisis Data	31	
G. Keabsahan Data.....	32	
BAB IV Hasil Dan Pembahasan		35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35	
B. Hasil Penelitian	46	

C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V Kesimpulan	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Riwayat Hidup	



Daftar Tabel

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	6
Tabel 3.1.....	33
Tabel 4.1.....	40
Tabel 4.2.....	41
Tabel 4.3.....	42
Tabel 4.4.....	44
Tabel 4.5.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 265 juta jiwa lebih pada tahun 2018, jumlah penduduk tersebut terdiri dari 133,88 juta jiwa perempuan dan 131,17 juta jiwa laki-laki. Jumlah penduduk di Indonesia masih akan terus bertambah di setiap tahunnya. Namun, apabila besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang baik masih menjadi permasalahan pokok di Indonesia.

Di Indonesia mempunyai kebijakan program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, yaitu dengan cara menunda perkawinan, mengatur kelahiran, dan mengatur jumlah anak yang ideal dalam keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi yang mengarah kepada laki-laki dan perempuan, Program KB ini di harapkan mampu menahan laju pertumbuhan masyarakat dan mengatur pembangunan. Untuk membantu program KB yang sifatnya nasional, dibentuk Kampung KB di Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Kampung KB adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga juga harus

mendapatkan perhatian dan di dukung juga dengan adanya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan Dan Pembentukan Kampung KB Di tiap-tiap Kabupaten/Kota, Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional RI Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pembentukan Dan Pencanaan Kampung KB, dan Perda Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Serta Surat Edaran Bupati Pada Tahun 2017 Tentang Pencanaan Kampung KB Di Setiap Kecamatan Dalam Rangka Mengatasi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program kampung KB, pasca dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Telah banyak kemajuan di berbagai daerah, berkat komitmen kuat dan kerjasama lintas sektor yang bergerak dengan satu tujuan untuk mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera dan berkualitas. Tahun 2018 ini di targetkan terbentuk satu kampung KB percontohan (Center Of Excellent) di tiap provinsi dan tahun 2019 terbentuk satu kampung KB percontohan (Center Of Excellent) di tiap kabupaten/kota.

Tujuan Kampung KB terbagi atas dua yaitu Tujuan umum dan Tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung menjadikan keluarga yang berkualitas melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK). Serta tujuan khususnya meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi,

melakukan pendampingan, dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan hidup masyarakat.

Di Indonesia, KB belum efektif karena program KB yang di laksanakan belum maksimal khususnya pada masyarakat daerah pelosok di Indonesia yang belum mengerti atau belum bisa mendapatkan KB, sedangkan menurut kepercayaan masyarakat terdahulu masih menerapkan banyak anak banyak rezeki. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi masalah pelaksanaan program KB. Di Indonesia sendiri hanya menganjurkan tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu, Kampung KB mendapat perhatian dan apresiasi tinggi sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan. Sasaran Kampung KB diutamakan adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah.

Di Kabupaten Barru, Kampung KB telah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatur kesejahteraan masyarakat dan mengatur pembangunan serta membantu program KB, Adapun Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Barru, Laki-laki sebanyak 83.082 orang dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 89.685 orang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Barru sudah memiliki 12 kampung KB yaitu Di Kecamatan Tanete Rilau Ada 1 : Di Desa Lipukasi, Di Kecamatan Tanete Riaja Ada 2 : Di Desa Alakkange Dan Panincong, Di Kecamatan Balusu Ada 2 : Di Desa Ujunge Dan Lapao, Di Kecamatan Mallusetasi Ada 2 : Di Desa Lojie Dan Buaka, Di Kecamatan Pujananting Ada 2 : Di Desa

Padanglampe Dan Tinco, Di Kecamatan Soppeng Riaja Ada 2 : Di Desa Paccekke Dan Tanrabalana Dan Di Kecamatan Barru Ada 1 : Di Desa Padongko (sumber : kampungb.bkkbn.go.id).

Program Kampung KB ini diharapkan mampu menahan angka laju pertumbuhan penduduk di daerah terpencil, menuntaskan kemiskinan, mengejar ketertinggalan masyarakat pedesaan, serta masyarakat diharapkan ikut dalam program Kampung KB, karena Kampung KB mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, dan membuat masyarakat akan mengikuti program KB. Namun partisipasi masyarakat Desa Lipukasi minim mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kampung KB tidak berjalan lancar, contohnya pada saat kegiatan gotong royong masyarakat desa lipukasi kurang ikut serta dalam kegiatan tersebut, serta kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep kampung KB mereka kurang berpartisipasi dengan pelaksanaan kampung KB ini karena mereka berfikir bahwa kampung KB hanya berfokus pada KB saja, mereka tidak mengetahui bahwa kampung KB ini mampu membentuk kerjasama antar masyarakat di desa tersebut. Masalah pelaksanaan kampung KB ini jugaterkendala dengan dana karena untuk melakukan pengembangan kegiatan memerlukan dana sedangkan dana desa sangat terbatas.

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Di Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2017

NO	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanete Rilau	Lasitae	805	856	1661
		Pancana	1802	1948	3750
		Lalabata	1878	1964	3824
		Corawali	1164	1212	2376
		Pao-Pao	1713	1926	3639
		Tellumpanua	1511	1578	3089
		Lalolang	2392	2528	4920
		Lipukasi	2072	2291	4363
		Tanete	1608	1689	3297
		Garessi	1372	1446	2818

Sumber : BPS Kab. Barru

Berdasarkan Data Bulan Januari Tahun 2019 di Desa Lipukasi adapun jumlah Kartu Keluarga sebanyak 1355 KK dan jumlah pasangan usia subur 690 orang sedangkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 425 pasangan.

Tabel 1.2 Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Peserta Kb Aktif

Dan Jumlah Peserta Yang Tidak Berpartisipasi

No	Jumlah pasangan usia subur	Jumlah peserta KB Aktif	Jumlah peserta yang tidak berpartisipasi
1	690	425	265

Adapun jenis alat kontrasepsi yang di gunakan peserta KB aktif di desa lipukasi yaitu (1) IUD (Intrauterine Device) berupa plastik yang berbentuk T seperti uang logam yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan, (2) Tubektomi/Mow (Metode Operasi Wanita), yaitu metode kontrasepsi bagus yang bersifat sukarela bagi seorang wanita jika tidak ingin hamil, (3) KB Implant merupakan pengontrol kehamilan jangka panjang dan (4) Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet untuk mencegah kehamilan. Dengan alat kontrasepsi di atas jumlah peserta KB aktif menjadi bertambah karena kesadaran masyarakat dan manfaat dari KB mulai di rasakan oleh Masyarakat Desa Lipukasi, alat kontrasepsi tersebut membantu pasangan-pasangan usia subur di desa lipukasi untuk lebih aktif dalam ber-KB.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana Implementasikebijakan program Kampung KB dalam meningkatkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung menjadikan keluarga yang berkualitas melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK). Hasil pemantauan peneliti, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian yang menyangkut Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi,

sehingga dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti terinspirasi untuk melakukan suatu penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru?
2. Apakah Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Lipukasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Barru terkait Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mendefinisikan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Badan-Badan dan Pejabat-Pejabat Pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Nugroho dalam Mulyadi (2016:165), mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh

pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program program yang dilakukan pemerintah. Jenkin dalam Suaib (2016:74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang

mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135), mengatakan bahwa proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision”* yaitu implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Grindle dalam Agustino(2008:139), mendefinisikan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah tujuan program tercapai. Tahap implementasi kebijakan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan,karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara

keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:139), proses implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari proses kebijakan tersebut.

Waldo dalam Suaib (20016:86) menyatakan bahwa model implementasi adalah saran untuk mengurangi semua konsepsi tentang sifat, realitas, atau universal, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman terhadap sesuatu atau menggunakan analogi, dimana pengkonsepsian sesuatu yang belum diketahui didasarkan pada sesuatu yang sudah diketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk memperoleh kejelasan suatu fenomena. Model-model implementasi ada yang bersifat abstrak, ada pula yang bersifat lebih operasional. Berikut adalah model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya yaitu:

a. Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
- 2) Sumber daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena

kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

- 4) Sikap Kecenderungan (disposition) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
- 5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi nya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaiknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif

yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:144), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada proses implementasi dapat dikategorikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
 - a) Kesukaran-kesukaran teknis
 - b) Keberagaman perilaku yang diatur
 - c) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
 - a) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b) Keterandalan teori kualitas yang diperlukan
 - c) Ketetapan alokasi sumber dana

- d) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang dimaksud dalam undang-undang
 - g) Akses formal pihak-pihak luar
- 3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, yaitu:
- a) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - b) Dukungan publik
 - c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

c. Model Implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik lainnya yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan

apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung hukum.

c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d) Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Berdasarkan dari penjelasan beberapa teori diatas mengenai implementasi kebijakan publik, maka dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, karena program Kampung KB bersifat Top-Down, artinya program tersebut dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, untuk menuruni angka kelahiran tinggi serta dapat mengendalikan angka kemiskinan. Dimana variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

3. Pengertian Keluarga Berencana Dan Kampung KB(Keluarga Berencana)

a. Keluarga Berencana

Menurut WHO (*World Health Organization*), Program Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu/ pasutri untuk Mendapatkan objektif- objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak

diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur *interval* diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

1) Tujuan KB meliputi:

- a) Keluarga dengan anak ideal
- b) Keluarga sehat
- c) Keluarga berpendidikan
- d) Keluarga sejahtera
- e) Keluarga berketahanan
- f) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
- g) Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)

2) Program Keluarga berencana memberikan dampak, yaitu :

- a) Penurunan angka kematian ibu dan anak;
- b) Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- c) Peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d) Peningkatan derajat keluarga;
- e) Peningkatan mutu dan layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f) Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM

b. Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

1) Pengertian kampung Keluarga Berencana (KB)

Kampung KB merupakan suatu strategi untuk membantu pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBP) kepada masyarakat di pedesaan. Sasaran kampung KB yaitu

penduduk yang tinggal wilayah miskin, wilayah padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber-KB masih rendah.

Kampung KB menjadi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBP) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatkan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

2) Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Dalam dua tahun setelah pencanangan Kampung KB, pelaksanaan di lapangan belum seperti di harapkan. Dari banyaknya lokasi kampung KB yang telah dicanangkan terdapat masalah-masalah yang berbeda dalam pelaksanaan di lapangan. Permasalahan utama di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan setelah pencanangan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor misalnya kurangnya pemahaman pemangku kepentingan akan konsep Kampung KB, dan kurangnya penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB.

3) Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung Keluarga Berencana (KB)

Dalam menentukan criteria pemilihan wilayah kampung ada 3 kriteria yang di perhatikan yaitu :

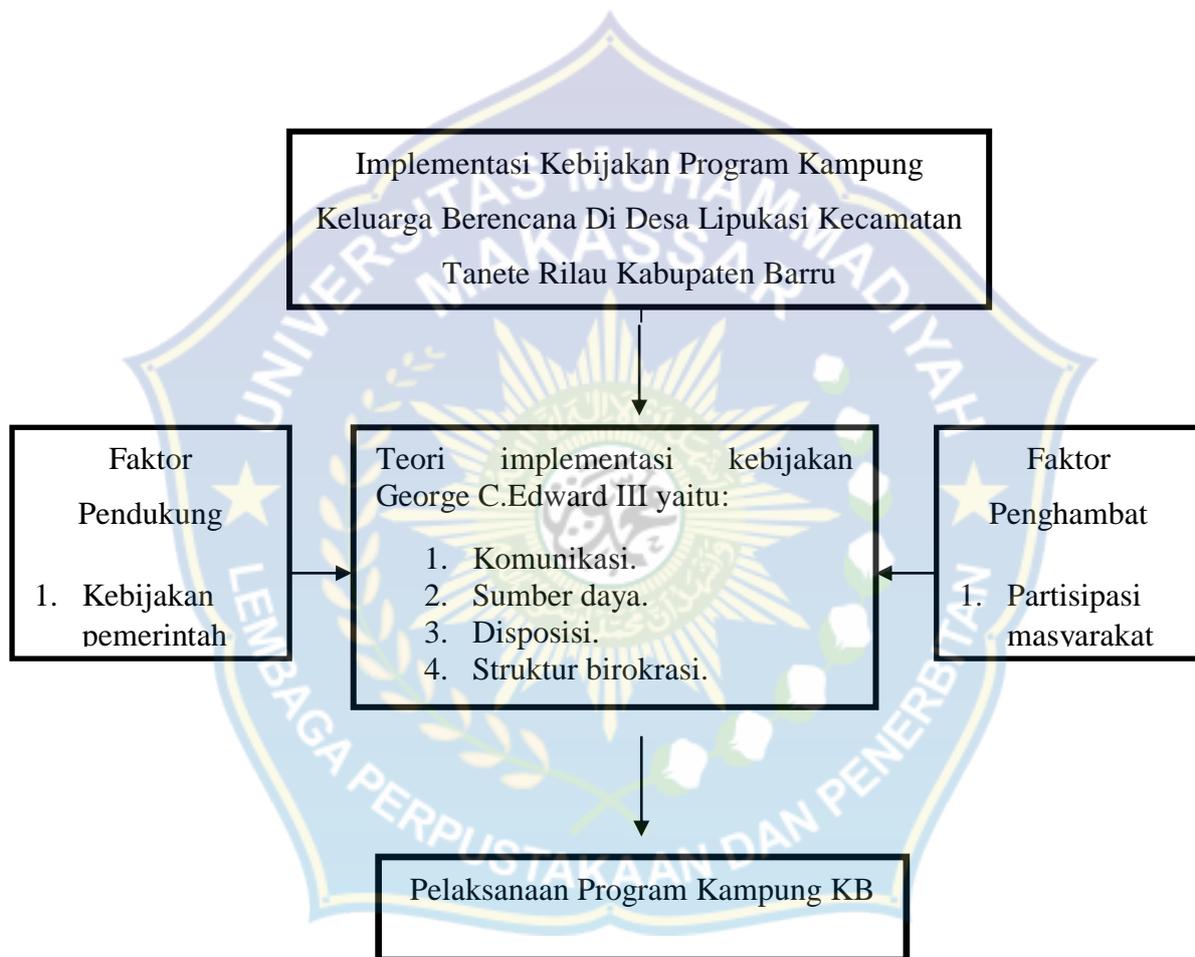
- a) Kriteria utama
- i) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga miskin diatas rata-rata Pra Sejahtera dan Keluarga miskin tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada.
 - ii) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- b) Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB (dipilih salah satu), yaitu:
- i) Kumuh
 - ii) Pesisir atau Nelayan
 - iii) Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - iv) Bantaran Kereta Api
 - v) Kawasan Miskin (Termasuk Miskin Perkotaan)
 - vi) Terpencil
 - vii) Perbatasan
 - viii) Kawasan Industri
 - ix) Kawasan Wisata Padat Penduduk.
- c) Kriteria Khusus
- i) Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan yang akurat.
 - ii) Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

iii) Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.



B. Kerangka Fikir

Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru memiliki 4 indikator yang harus di capai. Berdasarkan hal tersebut, Kerangka Pikir yang akan menjadi pola dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, melihat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat.

D. Deskriptif Fokus

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak.

5. Faktor pendukung dan Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kampung Kb di Desa Lipukasi. Dimana faktor tersebut menentukan berhasil atau tidaknya suatu Program. Faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah dan faktor penghambatnya adalah Kurangnya Partisipasi Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan tanggal 6 Juli 2019 – 6 September 2019. Lokasi penelitian ini dilakukan di Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Alasan peneliti menjadikan Desa lipukasi sebagai tempat penelitian hal ini karena peneliti melihat di Desa Lipukasi tempat di laksanakan program yang di namakan Kampung KB tersebut Program Kampung KB di Desa Lipukasi telah di terapkan namun permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat Desa Lipukasi kurang partisipasi dalam menyukseskan kegiatan kampung KB, serta kurangnya pemahaman pemangku kepentingan kurang berpartisipasi dengan pelaksanaan kampung KB ini karena mereka berfikir bahwa kampung KB hanya berfokus pada KB saja.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin di peroleh adalah proses pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Data Sekunder, yaitu data yang di kumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen dokumen yang bersifat informasi tertulis yang di kumpulkan peneliti adalah data mengenai proses pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* agar dapat menentukan informan penelitian. *Purpose sampling* adalah pemilihan informan bukan berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah namun didasarkan pada tujuan dan pertimbangan yang ditetapkan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Peneliti melakukan pilihan terhadap sampel dengan menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel mempunyai kriteria yang ditentukan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	inisial
1.	Ir. Abdu Sami	Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	A.S
2.	Maharuddin	Kepala Desa Lipukasi	M.H
3.	A. Ismawati, SKM	Sekretaris POKJA	A.I
4.	Ratna Tuti, S.Sos	Anggota POKJA	R.T
5.	Ibu Endang	Masyarakat Desa Lipukasi	EN
6.	Ibu Saddia	Masyarakat Desa Lipukasi	S.A
7.	Ibu Ika	Masyarakat Desa Lipukasi	I.K

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi Lapangan

Observasi adalah cara mengumpulkan data, di tempat peneliti melakukan pemantauan secara langsung ke sasaran penelitian untuk meninjau dari dekat aktifitas yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penelitian datang ke lokasi untuk melihat secara langsung dan dalam cara mengamati serta mencatat terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Untuk mendapat data dan gambaran mengenai proses pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

2. Metode Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan oleh semua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan itu, yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dalam penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Desa Lipukasi untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dengan menggunakan alat berupa kamera handphone.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:247-252), ketiga komponen tersebut adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah di dapatkan di lapangan jumlahnya lumayan banyak, jadi perlu untuk mencatat secara teliti serta rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka data yang didapat semakin banyak, saling berhubungan dan sulit. Untuk harus cepat melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah seperti merangkum, memilihkan hal-hal yang

penting, mengutamakan pada hal-hal yang sangat penting, mencari tema dan pola tersebut dan menghilangkan yang tidak diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Didalam penelitian kualitatif, untuk menyajikan data bisa dilaksanakan dengan bentuk penjelasan singkat, kerangka, menghubungkan antara bagian dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing and Vertification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diawal yang diungkapkan masih berstatus tidak lama, dan berubah bila tidak ada ditemukan bukti-bukti yang kuat dan didukung saat fase mengumpulkan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dipaparkan saat fase awal, mendapat dukungandari bukti-bukti yang sah dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, jadi kesimpulan yang disampaikan adalah kesimpulan yang menyakinkan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan tringulasi. Menurut Sugiyono (2012: 125), Tringulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012: 217), membagi tringulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber dilaksanakan dengan teknik melihat dan memastikan data yang didapatkan dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan hasil dari pengamatan dengan wawancara, dan melakukan perbandingan dari hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.

2. Tringulasi Teknik

Tringulasi teknik dilaksanakan dengan teknik memeriksa kembali data untuk sumber yang sama menggunakan cara yang lain. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian diperiksa dengan pemantauan serta dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melaksanakan perbincangan lebih lanjut dengan sumber data yang terkait atau yang lain, agar meyakinkan data yang dirasa benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Tringulasi Waktu

Waktu juga dapat berpengaruh terhadap kredibilitas data. Data yang dihimpun melalui cara wawancara saat pagi hari pada saat kondisi narasumber masih segar, belum terlalu banyak masalah, dapat memberikan data yang lebih sah sehingga lebih meyakinkan. Maka dari itu untuk rangka menguji kredibilitas data bisa dilakukan melalui teknik melaksanakan pemeriksaan dengan wawancara, pengamatan atau bisa cara lain dengan

waktu atau keadaan yang lain. Jika hasil uji mendapatkan data yang tidak sama, maka dilaksanakan dengan berulang-ulang hingga sampai didapatkan kepastian suatu datanya. Triangulasi bisa juga dilaksanakan melalui cara memeriksa hasil penelitian, dari grup peneliti lain yang diberikan tugas untuk mengumpulkan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung KB Di Desa Lipukasi

a) Sejarah Desa Lipukasi

Pada umumnya Masyarakat Desa Lipukasi hidup di tengah-tengah sosial budaya yang beraneka ragam disamping sebagai Masyarakat sosial petani juga dalam budayanya sebagai Masyarakat awam yang peka terhadap perkembangan zaman. Demikianlah Masyarakat Desa Lipukasi yang telah banyak sekali mengalami pertukaran zaman seirama dengan perkembangan sejarah yang pernah dialaminya. Era cultural dan sosial kemasyarakatan cukup memberi pengalaman hidup sebagai warga desa cukup baik dalam persatuan dan kesatuan tetap utuh sehingga kondisi masyarakat tetap menjamin kelancaran pembangunan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Menurut sejarah bahwa ciri sosial masyarakatnya berkaitan dengan nama Desa Lipukasi yaitu dalam Bahasa Bugis sebagai berikut: Lipu artinya Wanua (Dusun) dan kasi artinya berkasih-kasih (rukun).

Jadi dusun yang senantiasa diliputi oleh kasih sayang sesama warganya , pemberi nama ini menurut sejarah adalah diberikan Raja Tanete yang disebut daeng ngaseng yang mengangkat Raja Kecil di Lipukasi dengan sebutan Karaeng Lipukasi. Didalam pemerintahan Raja-Raja dahulu, Lipukasi banyak mengalami perubahan status yaitu pernah menjadi daerah otonom dan Kerajaan Tanete, kemudian menjadi persekutuan selanjutnya

menjadi distrik dan terakhir Desa. Pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia setelah Kerajaan Tanete dirubah menjadi administratif dimana telah terbentuk Kabupaten dari II Barru maka distrik lipukasi pun beralih menjadi Desa Lipukasi. Desa Lipukasi terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Pao, Dusun Salomoni, Dusun Mareto, Dusun Passedde, Dusun Lipukasi dan Dusun Gusunge, dan memiliki 16 RT.

b) Keadaan Geografi

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Di Desa Lipukasi merupakan salah satu dari 10 Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanete Rilau yang terletak 4 Km kearah utara kota Kecamatan dan 5 Km kearah selatan kota Kabupaten dengan luas wilayah 15,44 Km².

Sebelah Utara : Desa Garessi Kec. Tanete rilau
Sebelah Timur : Kel.Coppo Kec.Barru/ Desa Lempang Kec.Tanete
Riaja
Sebelah Selatan : Kel. Tanate Rilau Kec. Tanete Rilau
Sebelah Barat : Selat Makassar

Iklm Desa Lipukasi sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia memiliki Iklm Kemarau dan Penghujan, hal tersebut berpengaruh pada Tanam Pertanian yang ada di Desa Lipukasi.

2) Topografi

Desa lipukasi mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter di atas Permukaan Laut dengan bentuk Permukaan sebahagian besar Daerah Kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan Daerah Datar hingga Landai.

3) Hidrologi

Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dimana potensi sumber air di desa lipukasi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai.

4) Klimatologi

★ Tipe Iklim di Desa Lipukasi yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (oktober sampai dengan maret) dan bulan kering berturut-turut 5-6 bulan (april sampai dengan September) dengan hari hujan sebanyak 2 hari.

5) Penggunaan lahan

Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum dapat di bagi dalam 7 kategori besar yaitu :

Tabel 4.1 Luas wilayah berdasarkan penggunaan

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Tanah Pemukiman	49,2 Ha
2	Tanah Persawahan	241 Ha
3	Tanah Kering	6,7 H
4	Tanah Basah	23 Ha
5	Tanah Perkebunan	133,4 Ha
6	Tanah Fasilitas Umum	6,7 Ha
7	Tanah Hutan	470 Ha

sumber data : diolah tim penyusun RPJMDes Desa Lipukasi

6) Keadaan Demografi

a) Struktur Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama di Desa Lipukasi dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 4.2 :Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Dusun	Agama				Jumlah
		Islam	Kristen	Hindu	Budha	
1	Pao	832	0	0	0	832
2	Salomoni	605	0	0	0	605
3	Lipukasi	985	0	0	0	985
4	Gusunge	154	0	0	0	154
5	Mareto	1397	0	0	0	1397
6	Passedde	423	0	0	0	423

Sumber data : diolah tim penyusun RPJMDes Desa Lipukasi

Dari Data tersebut dapat dilihat bahwa Agama Islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat desa lipukasi.

b) Struktur menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk terbesar berada pada dusun mareto mencapai 1.397 jiwa dan terendah berada pada dusun gusunge dengan jumlah 154 jiwa.

Tabel 4.3 :Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pao	391	441	832
2	Salomoni	314	291	605
3	Lipukasi	484	501	985
4	Gusunge	69	85	154
5	Mareto	669	728	1.397
6	Passedde	199	224	423
Jumlah		2.126	2.270	4.396

Sumber data : diolah tim penyusun RPJMDes Desa Lipukasi

c) Struktur Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat desa lipukasi mayoritas adalah petani dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Mata Pencaharian Desa Lipukasi

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Buruh tani	50
2	Petani	342
3	Peternak	170
4	Nelayan	10
5	Pedagang	257
6	Tukang kayu	90
7	Penjahit	15
8	Pns	150
9	Pensiunan	50
10	Tni polri	6
11	Perangkat desa	18
12	Industri kecil	10
13	Buruh Industri	15
14	Lain-lain	20

Sumber data : diolah tim penyusun RPJMDes Desa Lipukasi

7) Keadaan sosial dan budaya

a) Pendidikan

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Lipukasi dikategorikan terbelakang di banding desa lainnya. Sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin memajukan pendidikan di Desa ini. Data tingkat pendidikan di Desa Lipukasi sebagai berikut :

Tabel 4.5 :Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Dusun						
		Pao	Salomo ni	Lipuka si	Gusun ge	Mareto	Passe dde	Jumla h
1	Tidak Pernah Sekolah	23	13	13	10	22	9	90
2	Belum Sekolah	111	60	131	15	150	42	509
3	Tidak Tamat Sd	5	30	8	10	20	12	85
4	Belum Tamat Sd	86	40	98	12	180	33	449
5	Sd	378	572	298	100	330	107	1785
6	Sltp	212	236	250	96	311	102	1207
7	Slta	187	221	214	98	253	66	1039
8	Diploma	15	6	13	2	23	3	62
9	Sarjana	130	102	69	3	166	26	496

Sumber data : diolah tim penyusun RPJMDes Desa Lipukasi

b) Kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Desa Lipukasi cukup memadai hanya saja tenaga medisnya perlu di tambah yang lebih professional lagi sehingga ketika ada orang yang tiba-tiba menderita pada malam hari cepat tertangani oleh pertolongan pertama sama tenaga medis yang tersedia di desa lipukasi karena penyakit yang biasa di derita oleh warga

adalah penyakit diare/muntaber dan demam berdarah yang terkena musibah semua harus cepat terlayani secara darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa fatal. Apalagi dengan adanya pelayanan kesehatan gratis yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengobatan baik Pustu maupun di rumah sakit secara merata tanpa membeda-bedakan derajat sosial.

Sarana pelayanan kesehatan di Desa Lipukasi telah tersedia satu unit Bangunan permanen Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pelayanan Posyandu di empat dusun yang tersebar di Desa Lipukasi walaupun bangunannya masih sangat sederhana, tetapi pelayanan secara rutin setiap bulan yaitu penimbangan bayi, pemberian makanan bergizi, vitamin A, pemberian susu bagi balita dan pemeriksaan Bumil serta penyuluhan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

c) Visi Misi Kantor Desa Lipukasi

a. Visi

“Menjadikan Desa Lipukasi Sebagai Desa Yang Maju Dan Beradab”

b. Misi

- 1) Peningkatan pelayanan publik
- 2) Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 3) Penguatan Infrastuktur

d) Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga

Berencana (KB) di Desa Lipukasi

- a. Pembina : Maharuddin
- b. Ketua : M. Bakri
- c. Sekretaris : A.Ismawati, SKM
- d. Bendahara : Hj. Murni

1) Pelaksana Operasional :

- a) Seksi Agama : 1. Drs. Muktar H. Mustafa
2. Mustafa Kamal S.Ag
3. Darwis Idrus

- b) Seksi Pendidikan/Sosialisasi : 1. Salma Nur S.Pd, MM
2. Dra. Harfiah, M.Pd
3. Haeril S.Pd

- c) Seksi Reproduksi : 1. Marsani S.Pd
2. Saddia M
3. Salwiana

- d) Seksi Ekonomi : 1. H. Mashud
2. Maskur HM
3. Martasia

e) Seksi Perlindungan : 1. Sahiruddin T
2. Makmur
3. M. Yunus

f) Seksi Kasih Sayang : 1. Ratna Tuti S.Sos
2. Nur Asma S.Pd

g) Seksi Sosial Budaya : 1. Erwin SH,MH
2. Muslimin, S.Pd
3. Bambang Irawan

h) Seksi Pembinaan Lingkungan : 1. Harun Rasyid, S.Pd
2. Subhan, S.ST
3. Nuraeni Darwis
4. Ferdiansyah.



Adapun kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan kelompok kerja (POKJA) Kampung KB desa lipukasi antara lain:

1. Pelatihan membuat Bros, Gelang dan Tas Pesta oleh Bidang Keluarga Berencana (KB) bekerja sama dengan ketua Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kab.Barru.
2. Advokasi pada tokoh masyarakat dan tokoh agama
3. Pembinaan kader Keluarga Berencana (KB)
4. Sosialisasi yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Prov. Sulsel
5. Lokakarya mini Kampung Keluarga Berencana (KB)
6. Pembuatan saluran air
7. Kerja bakti pemakaman islam dusun Lipukasi
8. Kerja bakti di masjid nurul aini dusun lipukasi
9. Kerja bakti persiapan Rumah Dataku
10. Pengolahan ban bekas menjadi pot bunga
11. Pelatihan memandikan jenazah
12. Kerja bakti membersihkan lorong 1 pasca pembuatan saluran air oleh ibu-ibu setempat
13. Pembuatan Rumah Data
14. Pengajian Rutin 2 kali Sebulan.

e) Tugas Kelompok Kerja (POKJA)

- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan Kampung KB Dusun Lipukasi Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Melaksanakan kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada desa.

B. Hasil Penelitian

Peneliti akan membahas bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang meliputi indikator. (1) komunikasi yang didalamnya terdapat aspek (a) transmisi, (b) kejelasan informasi dan (c) konsistensi informasi. Indikator (2) sumber daya yang didalamnya terdapat (a) staf, (b) informasi, (c) wewenang dan (d) fasilitas. Indikator (3) disposisi dan indikator (4) struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB), Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam Budi Winamo (2007:174) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan /atau publik dan sikap serta tanggapan dari pra pihak yang

terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Model komunikasi yang dilakukan adalah Model Lasswell, Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni *who says what in which channel to whom with what effect* (siapa mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dengan pengaruh apa). Model ini sering digunakan pada komunikasi massa.



Model Komunikasi Lasswell

Kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran bersangkutan. Dalam pelaksanaan program Kampung KB di desa lipukasi Komunikasi yang di lakukan yaitu dengan sosialisasi. Dengan sosialisasi, pihak yang melaksanakan program ini menjelaskan

keuntungan serta kelebihan program ini. Kemudian jika di lihat dari aspek

(a) Transmisi, (b) Kejelasan Informasi Dan (c) Konsistensi Informasi.

a. Transmisi

Transmisi (penyaluran) informasi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Penyaluran informasi yang di lakukan pelaksana kebijakan dengan masyarakat disampaikan melalui media langsung yakni di lakukan dengan melalui pertemuan dan sosialisasi. Dengan pertemuan dan sosialisasi masyarakat mudah untuk mengetahui bahwa akan ada kegiatan Kampung KB di Desa Lipukasi.

Berikut adalah Hasil wawancara A.I selaku sekretaris Kelompok kerja (POKJA) Kampung KB di Desa Lipukasi terkait transmisi dalam menyampaikan kegiatan program Kampung KB:

“begini dek, kalau berbicara tentang penyaluran komunikasi kami dari pihak pelaksana dilapangan, sebelum ada kegiatan yang ingin di lakukan kami sosialisasi dulu dengan masyarakat di desa lipukasi, sosialisasi tentang keuntungan kegiatan yang akan di laksanakan seperti misalnya pembuatan bros, kami membuat kegiatan ini agar ibu-ibu di Desa Lipukasi memiliki bakat dalam kerajinan tangan. Dan kamipun, mendapat respon baik dari masyarakat”(hasil wawancara pada tanggal 08 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran komunikasi dalam Implementasi Program Kampung KB di Desa Lipukasi sudah baik karena media yang digunakan adalah media langsung. Dengan media langsung akan mengurangi terjadi

kesalahpahaman tentang kegiatan yang ingin di laksanakan Kelompok Kerja bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada.

Dan kemudian di dukung hasil wawancara di atas di dukung oleh pernyataan ibu IK selaku masyarakat di desa lipukasi sebagai berikut :

“komunikasi yang di lakukan cukup lancar karena apabila ada kegiatan yang ingin di lakukan menyangkut kampung KB, masyarakat cepat mengetahui karena sebelumnya sudah di sosialisasikan tapi terkadang juga ada ibu-ibu yang kurang merespon ini kegiatan karena mereka berfikir harus ikut KB apabila ingin ikut program Kampung KB, jadi terkadang pihak pelaksana harus menjelaskan dulu agar masyarakat mengerti”(hasil wawancara pada tanggal 18 juli 2019)

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa Implementasi Program Kampung KB di Desa Lipukasi dalam segi transmisi (penyaluran) sudah baik karena mendapatkan respon baik dari masyarakat pada saat melaksanakan salah satu kegiatan, karena kegiatan Kampung KB memang di peruntukkan untuk masyarakat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih berfikiran apabila ingin berpartisipasi dalam program kampung KB harus ikut KB. Hal ini menjadi masalah yang harus di selesaikan pihak pelaksana agar tidak adanya kesalahpahaman.

b. Kejelasan informasi

Kejelasan informasi dalam Implementasi Program Kampung KB terdiri dari penyampaian instansi yang ingin melakukan kegiatan di Kampung KB di Desa Lipukasi, serta penyampaian pihak pelaksana yaitu Kelompok Kerja harus memiliki keterbukaan mengenai informasi

penyelenggaraan kegiatan program Kampung KB agar mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap kegiatan yang di lakukan. Kejelasan informasi di butuhkan agar seluruh penyelenggara mengetahui secara jelas informasi apa saja yang akan di laksanakan oleh pihak pelaksana. Apabila ada perubahan jadwal kegiatan sebaiknya harus di konfirmasi secepatnya.

Berikut hasil wawancara A.S selaku Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

“berbicara tentang kejelasan informasi nya cukup baik karena di dalam Kampung KB di desa lipukasi bukan Cuma untuk KB saja tapi semua instansi berpartisipasi di dalamnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dll. Jadi untuk kejelasan informasi kita serahkan kepada instansi masing-masing yang ingin melakukan kegiatan misalnya Dinas Pendidikan ingin melakukan pelatihan untuk anak SD. Dinas pendidikan harus bekerja sama dengan pihak pelaksana di lapangan yaitu Kelompok Kerja dalam menyampaikan kegiatan nya. Manfaat dari kegiatan harus di jelaskan terlebih dahulu melalui sosialisasi. Jadi masyarakat nantinya tidak salah paham tentang kegiatan dan juga masyarakat berpartisipasi penuh dalam kegiatan Kampung KB yang di laksanakan” (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2019)

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa kejelasan informasi sudah cukup baik, apabila dinas yang melaksanakan kegiatan di Kampung KB desa lipukasi harus memiliki peran aktif dalam menyampaikan dan menyelenggarakan kegiatannya serta kerja sama dengan pihak pelaksana di lapangan.

Hasil wawancara di atas didukung oleh pernyataan E.N selaku warga masyarakat desa Lipukasi sebagai berikut :

“kejelasan informasi, apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kampung KB Desa Lipukasi, pelaksana akan menyampaikannya dengan mengumumkan kegiatan tersebut di masjid jadi kami masyarakat desa Lipukasi dengan jelas mengetahui informasi kegiatan yang akan dilaksanakan.”(hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang didapat oleh masyarakat sangat baik karena langsung menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa akan ada kegiatan yang ingin dilaksanakan.

c. Konsistensi Informasi

Konsistensi diperlukan agar pelaksanaan suatu program yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berikut adalah Hasil wawancara A.I selaku sekretaris Kelompok kerja (POKJA) Kampung KB di Desa Lipukasi sebagai berikut :

“kalau perintah-perintah pelaksanaan sudah jelas, namun terkadang terjadi kesalahpahaman masyarakat dan pihak pelaksana karena masih ada masyarakat yang berfikir program kampung kb berfokus

hanya kb saja serta apabila setelah kegiatan tidak ada evaluasi dari pusat” (hasil wawancara pada tanggal 08 agustus 2019)

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158:159), sumber daya merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik dan juga Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan tidak efektif. Indikator-indikator yang di gunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terdiri dari a. staf, b. informasi, c. wewenang dan d. fasilitas.

a. Sumber daya manusia (staff)

Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya manusia (staf) tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan,dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program.

Kampung KB di Desa Lipukasi saat ini memiliki sekitar 40 orang pelaksana di lapangan dengan ini yang di maksud adalah Kelompok Kerja (POKJA). Dengan jumlah sekitar 40 orang dalam ruang lingkup kampung KB di Desa Lipukasi yang ada sudah cukup memadai namun karena Kampung KB di Desa Lipukasi yang tadinya hanya berpusat di Dusun Lipukasi ingin di kembangkan menjadi ruang lingkup desa, Kampung KB ini rencananya akan di perluas ruang lingkungnya bukan lagi dusun tapi rencananya ingin di perluas menjadi satu desa.

Berikut hasil wawancara A.S selaku Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

“begini dek, di Kampung KB Lipukasi, awal pembentukannya itu hanya dusun jadi untuk lebih efisiennya ini program kita di bentuk kelompok kerja sebagai pelaksana dan penanggung jawab di lapangan. Jumlah kelompok kerja yang di bentuk oleh kepala desa sendiri sekitar 40 orang, jumlah cukup memadai untuk pelaksanaan program kampung KB dalam ruang lingkup dusun tapi setelah perbincangan dengan berbagai pihak di putuskan akan di buat kembali Kampung KB dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan ini membuat sumber daya manusia yang ada akan di tambah karena apabila masih mengandalkan anggota POKJA saat ini yang sekitar 40 orang dengan ruang lingkup yang luas akan kewalahan nantinya. Jadi keputusan yang di buat sumber daya manusia akan di tambah apabila rencana ini terealisasikan” (hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Penjelasan di atas di ketahui bahwa Program Kampung KB di Lipukasi ruang lingkungnya akan di perluas ,dengan sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai namun apabila ruang lingkup

Kampung KB di Desa Lipukasi diperluas maka sumber daya manusia harus di tambah.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus di lakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan program memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB di Lipukasi, kekurangan informasi dari tingkat pusat akan kebutuhan yang di perlukan oleh pelaksana lapangan. Program Kampung KB di Lipukasi hanya di bebaskan kepada pelaksana lapangan yakni Kelompok Kerja (POKJA). Kurangnya pengetahuan/informasi dalam melaksanakan program Kampung KB, dari tingkat pusat kurang membantu dalam menyukseskan program Kampung KB.

Berikut adalah Hasil wawancara A.I selaku sekretaris Kelompok kerja (POKJA) Kampung KB di Desa Lipukasi sebagai berikut :

“dalam pelaksanaan program Kampung KB di Lipukasi, kami selaku pelaksana di lapangan bekerja keras untuk menyukseskan ini program, karena hanya Kampung KB di Lipukasi saja sekarang yang aktif, kampung KB yang lain sudah banyak yang tidak bergerak. Kalau masalah kegiatan semua berjalan dengan lancar karena segala kegiatan harus ada dokumentasinya kemudian di laporkan. Atasan tidak terlalu merespon, tidak adanya kerja sama antar setiap instansi, arahnya juga tidak jelas mau di apakan program ini, hanya Kelompok Kerja yang bekerja terus serta setelah kegiatan tidak ada evaluasi”(hasil wawancara pada tanggal 08 agustus 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, informasi/pengetahuan dalam pelaksanaan program Kampung KB, cara menyelesaikan kegiatan yang di laksanakan yaitu dengan mengandalkan pelaksana di lapangan seharusnya ada kerja sama antara pelaksana lapangan dengan tingkat pusat sehingga meminimalisir kesalahan yang ada. Peran Kelompok Kerja sangat berpengaruh dalam program Kampung KB ini namun harus ada kerja sama baik di tingkat pusat maupun instansi-instansi yang mengadakan kegiatan.

c. Kewenangan

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Dalam pelaksanaan Kampung KB di Lipukasi, semua kegiatan terkendala dengan dana karena dana yang di pakai sangat terbatas, anggaran terbatas membuat sebagian kegiatan belum terealisasi, maka dari itu perlu perhatian lebih terhadap

anggaran karena kegiatan tidak akan berjalan lancar apabila tidak memiliki anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan R.T selaku anggota POKJA di bidang seksi kasih sayang sebagai berikut :

“kegiatan program kampung kb sebenarnya banyak Cuma terkendala oleh dana, tidak adanya anggaran pasti yang mengikat kita, jadi kita selaku pelaksana tidak bisa apa-apa. Maka dari itu banyak kegiatan program kampung KB yang tidak Terealisasikan misalnya pembuatan Gapura profil Kampung KB belum terlaksana karena terkendala oleh anggaran yang terbatas. Dan untungnya sekarang kampung kb di lipukasi sudah mempunyai rumah data yang anggaran di bantu oleh anggaran desa....” (hasil wawancara pada tanggal 07 agustus 2019)

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program kampung KB sangat terbatas, banyak kegiatan yang ingin di realisasikan tapi terkendala di anggaran. Kerja sama sangat di butuhkan serta komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan tingkat pusat.

d. Fasilitas

Fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya, pengadaan fasilitas yang layak mendukung terlaksana suatu kegiatan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan program Kampung KB di Desa Lipukasi.

Kampung KB di desa lipukasi sudah mempunyai fasilitas yang tidak di miliki oleh Kampung KB lain yang ada di kabupaten Barru yaitu Rumah Data. Rumah Data bertujuan untuk menyimpan semua data yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat contohnya data dari dinas

pendidikan tentang jumlah anak putus sekolah dan lain-lain, rumah data ini sangat membantu Program Kampung KB dalam mensejahterakan masyarakat.

Berikut adalah Hasil wawancara A.I selaku sekretaris Kelompok kerja (POKJA) Kampung KB di Desa Lipukasi sebagai berikut :

“fasilitas yang ada di Kampung KB Desa Lipukasi yang memadai itu hanya rumah data saja, dan ada juga komputer tapi tidak punya aliran listrik , fasilitas di sana masih kurang sekali karena belum memiliki profil Kampung KB. Belum ada gapura yang menandakan lokasi kampung KB, kami pernah mengusulkan tapi lagi-lagi terkendala oleh dana”(hasil wawancara pada tanggal 08 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa fasilitas Kampung KB di Desa Lipukasi masih kurang memadai dan masih harus di tingkatkan seperti gapura yang menandakan lokasi Kampung KB ini sangat penting di wujudkan karena agar profil kampung KB terlihat.

Kemudian di dukung oleh hasil wawancara S.A selaku masyarakat di Desa Lipukasi sebagai berikut :

“fasilitas Kampung KB di desa lipukasi masih sangat kurang karena tidak adanya tempat pelayanan KB dan alat KB lainnya pil dan suntik belum ada. Jadi program KB tidak terlalu maksimal, kami ibu-ibu berharap agar cepat di hadirkan agar proses KB di Desa Lipukasi tidak terkendala” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat sangat berharap agar pelaksana program mampu mengadakan

fasilitas yang memadai, program Kampung KB dapat berjalan dengan lancar apabila fasilitas yang ada mendukung.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, disposisi menentukan Keberhasilan sebuah Implementasi Kebijakan. Apabila pelaksana memiliki Disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2007: 174)

Disposisi yang di lakukan dalam melaksanakan program kampung KB adalah tentang komitmen. Komitmen yang di buktikan dengan melihat alasan pelaksana untuk dapat melaksanakan program dengan baik, tujuan/perubahan yang ingin di capai dan perubahan yang telah di capai oleh pelaksana dalam melaksanakan program Kampung KB di Desa Lipukasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.H selaku Kepala Desa Lipukasi adalah sebagai berikut :

“berkaitan dengan sikap para pelaksana yang melaksanakan segala kegiatan yang ada sudah sangat maksimal, apa yang di lakukan POKJA membuat kampung kb ini bisa aktif kembali, serta komitmen yang di buktikan oleh POKJA sangat berperan penting, mereka bekerja sangat keras untuk kemajuan program ini. Dengan adanya rumah data yang menjadi satu-satunya Kampung KB di Kabupaten Barru yang memiliki rumah data dan serta banyak

perubahan yang terjadi membuat Kampung KB di Desa Lipukasi akan di jadikan Kampung KB Percontohan oleh Kampung KB lain yang ada di Kabupaten Barru. Saya sangat berterima kasih kepada kerja keras POKJA atas keberhasilan yang terjadi di lapangan” (hasil wawancara pada tanggal 12 agustus 2019)

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Lipukasi. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering di sebut SOP (*Standar operating procedures*) dan fragmentasi (Winarno, 2014:206). SOP yang baik adalah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja pelaksana.

Berikut adalah Hasil wawancara M.H selaku Kepala Desa lipukasi sebagai berikut:

“untuk standar pelaksanaan atau standar operasional prosedur (SOP) Program ini Adalah Buku petunjuk Teknis pelaksanaan Kampung KB sebagai pedoman Para petugas Kampung KB dalam melaksanakan suatu Program. Mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan. Mengenai struktur birokrasi ini telah tercantum dalam keputusan kepala desa Nomor 17/Kep. Des/IV/2019 tentang pembentukan kepengurusan Pokja Kampung KB Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau. Dengan adanya POKJA ini membuat struktur birokrasi yang ada tidak terlalu rumit karena anggota POKJA di dalamnya kebanyakan orang-orang bertempat tinggal di Lipukasi” (hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019)

5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi.

a) Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi adanya kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ada pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapatkan perhatian dan di dukung juga dengan adanya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan Dan Pembentukan Kampung KB Di tiap-tiap Kabupaten/Kota, Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional RI Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pembentukan Dan Pencanaan Kampung KB, dan Perda Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Serta Surat Edaran Bupati Pada Tahun 2017 Tentang Pencanaan Kampung KB Di Setiap Kecamatan Dalam Rangka Mengatasi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru.

Berikut hasil wawancara A.S selaku Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,

Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

“Keberhasilan Program Kampung KB di dukung oleh kebijakan pemerintah karena program ini sangat di dukung oleh pemerintah. Maka dari itu, tidak banyak kendala yang di alami di lapangan yang berhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah sangat mendukung program ini, Program Kampung KB menjadi Program Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat” (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2019)

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Lipukasi adalah Partisipasi Masyarakat. Kurangnya Partisipasi Masyarakat menjadikan program Kampung KB tidak terlaksana dengan baik. Pemikiran Masyarakat Desa Lipukasi masih berfikiran program Kampung KB hanya berfokus KB saja.

Berikut adalah Hasil wawancara M.H selaku Kepala Desa lipukasi sebagai berikut:

“hambatan yang di dapat pada saat pelaksanaan program Kampung KB desa lipukasi terdapat pada partisipasi masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama di dalam pelaksanaan program kampung KB. Partisipasi masyarakat kurang karena masyarakat menganggap program ini sama dengan program KB, serta kegiatan-kegiatan yang di lakukan pada pagi hari mengakibatkan kurangnya masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan dan juga pemikiran budaya masyarakat masih melekat.”(hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka pikir atau kerangka teori yang menjadi dasar atau landasan penelitian. Adapun pembahasan kerangka pikir atau kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan program kampung KB di Desa Lipukasi sudah berjalan lancar. Komunikasi yang diterapkan dengan media langsung seperti pertemuan dan sosialisasi. Sebelum ada kegiatan yang akan dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan masyarakat, menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik dari Dinas yang bersangkutan maupun instansi-instansi terkait yang ingin melakukan kegiatan di Kampung KB Desa Lipukasi. Berdasarkan Hasil wawancara komunikasi dan koordinasi sudah sangat baik karena komunikasi yang dilakukan dengan media langsung tanpa perantara yaitu sosialisasi dan pertemuan, masyarakat dan pelaksana langsung bertatap muka kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di jelaskan. Kemudian Kejelasan informasinya cukup baik karena sebelum kegiatan dilakukan satu hari sebelum dilakukannya kegiatan akan ada sosialisasi terlebih dahulu.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Kampung KB di Desa Lipukasi sudah cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara, dilihat dari Sumber daya manusia, Sumber

daya manusia kurang lebih 40 orang yang menjadi pengurus Kelompok Kerja dan bertempat tinggal di Desa Lipukasi. Namun sumber daya manusia yang ada tidak memadai apabila ruang lingkup Kampung KB Desa Lipukasi di perluas. Terkait fasilitas, pengadaan fasilitas yang layak mendukung terlaksana suatu kegiatan, fasilitas yang ada di Kampung KB Desa Lipukasi sangat terbatas hanya saja memiliki rumah data, tidak adanya gapura membuat lokasi kampung kb tidak terlalu Nampak.

3. Disposisi

Disposisi atau Sikap para pelaksana membuat kampung KB desa lipukasi masih aktif sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara sikap yang dilakukan dalam melaksanakan program kampung kb adalah tentang komitmen. Komitmen para pelaksana dibuktikan dengan banyaknya perubahan di Lokasi Kampung KB dan menjadikan satu-satunya Kampung KB di Kabupaten Barru yang memiliki Rumah Data serta membuat Kampung KB di Desa Lipukasi akan di jadikan Kampung KB Percontohan Di Kabupaten Barru.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengenai prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering di sebut SOP (Standar Operating Procedures) sudah sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara untuk standar pelaksanaan atau standar operasional prosedur (SOP) Program ini Adalah Buku petunjuk Teknis pelaksanaan Kampung KB sebagai pedoman Para petugas Kampung KB dalam melaksanakan suatu Program. Dengan adanya

POKJA ini membuat struktur birokrasi yang ada tidak terlalu rumit karena anggota POKJA di dalamnya kebanyakan orang-orang bertempat tinggal di Lipukasi.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kampung KB Desa Lipukasi

a) Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung Program Kampung KB adalah Kebijakan Pemerintah, Berdasarkan hasil wawancara Kebijakan Pemerintah ini menjadi Dasar Pembentukan Program Kampung KB, Pemerintah sangat mendukung Program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung program Kampung KB di desa Lipukasi.

Kebijakan pemerintah yang ada pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapatkan perhatian dan di dukung juga dengan adanya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan Dan Pembentukan Kampung KB Di tiap-tiap

Kabupaten/Kota, Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional RI Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pembentukan Dan Pencanaan Kampung KB, dan Perda Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Serta Surat Edaran Bupati Pada Tahun 2017 Tentang Pencanaan Kampung KB Di Setiap Kecamatan Dalam Rangka Mengatasi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru.

b) Faktor penghambat

Faktor penghambat Program Kampung KB di Desa Lipukasi adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang program Kampung KB masih minim, serta kegiatan kampung KB di lakukan pada pagi hari mengakibatkan partisipasi masyarakat kurang. Dan juga budaya masyarakat di Desa Lipukasi masih kental dan melekat. Partisipasi masyarakat di Desa Lipukasi menjadi permasalahan utama program Kampung KB di Desa Lipukasi, terkendalanya kegiatan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan yang ada.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menjadi hal yang penting tanpa adanya partisipasi dalam kegiatan ini akan membuat program ini tidak akan bermanfaat, karena program ini di khususkan untuk masyarakat itu sendiri. Partisipasi memiliki arti keterlibatan aktif dari masyarakat, Kampung KB

dinyatakan berhasil apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan program Kampung KB, kesadaran masyarakat perlu di tambah tentang manfaat kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Kelompok Kerja, Kelompok Kerja juga melakukan Pertemuan dan sosialisasi sebelum kegiatan di laksanakan, hal ini di lakukan agar masyarakat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa:

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, penulis menarik kesimpulan yaitu Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Lipukasi merujuk pada 5 indikator yaitu

1. Implementasi Kebijakan program Kampung KB di Desa Lipukasi sudah sangat baik, dilihat dari 4 indikator yaitu (1) Komunikasi yang di lakukan sudah cukup baik karena melakukan komunikasi secara langsung melalui pertemuan dan sosialisasi. Hal ini mengurangi kesalahpahaman masyarakat akan kegiatan yang akan di laksanakan, (2) Sumber daya, Sumber daya manusia yang ada di Kampung KB Desa lipukasi sudah sangat memadai namun apabila ruang lingkup nya di perluas perlu ada penambahan sumber daya manusia agar program ini berjalan baik, serta fasilitas yang kurang membuat kegiatan-kegiatan terhambat, fasilitas rumah data ini menjadi ikon tersendiri bagi Kampung KB Desa Lipukasi karena satu-satunya Kampung KB di Kabupaten Barru yang memiliki rumah data. (3) Disposisi, sikap para pelaksana membuat banyak perubahan di Kampung KB desa Lipukasi, Hal ini di buktikan dengan adanya Rumah Data di Desa lipukasi dan juga menjadikan Kampung KB

di Kabupaten Barru yang masih aktif. (4) Struktur Birokrasi, Standar pelaksanaan atau standar operasional prosedur (SOP) Program ini terdapat di Buku petunjuk Teknis pelaksanaan Kampung KB sebagai pedoman Para petugas Kampung KB dalam melaksanakan suatu Program. Mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kampung KB di Desa Lipukasi diantaranya faktor pendukung yaitu adanya kebijakan pemerintah sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran terkait. Implementasi Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Untuk kelancaran Program Kampung KB ini, sebaiknya Kelompok Kerja (POKJA) dan instansi lain harus membangun kerja sama yang baik serta para atasan-atasan yang berperan aktif dalam kelancaran program ini harus berpartisipasi karena program ini dilakukan bersama-sama bukan hanya POKJA saja bekerja. Dengan komunikasi dan kerja sama baik antar pihak pelaksana dan masyarakat akan membuat program kampung kb ini dapat berjalan lancar dan segala kendala-kendala yang ada di lapangan mampu di selesaikan dengan baik
2. Fasilitas yang ada di kampung KB perlu di tingkatkan seperti gapura perlu di peradakan karena gapura tersebut menjadi pertanda Kampung KB di

Desa Lipukasi. Fasilitas Rumah data juga harus di lengkapi agar masyarakat dengan mudah melihat data yang ada serta instansi-instansi lain juga bisa melihat data-data yang harus di lengkapi. Dengan adanya fasilitas yang memadai akan membuat kegiatan-kegiatan mudah untuk di lakukan.



Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Kabupaten Barru Dalam Angka 2018. (Diakses 01 Juni 2019).
- Bungin, H.M. Burhan .2009. *Penelitian Kualitatif(Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta :Kencana
- Moleang, Lexy J. 2011. *Metedologi Penelitian Kualitatif* .Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016.*Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono, Dr.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*.Bandung :Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Widodo, Joko.2010. *analisis kebijakan publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayu Media
- Winarno, Budi.2012.*Kebijakan Publik (Teori ,Proses Dan Studi Kasus)*.Yogyakarta : PT. Buku Seru
- Peraturan :**
- Buku Panduan Kampung KB Percontohan
- Perda Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
- Perdes Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023
- Surat Edaran Bupati Pada Tahun 2017 Tentang Pencanaan Kampung KB Di Setiap Kecamatan Dalam Rangka Mengatasi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru.
- Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

Jurnal :

Isnawati.2017. Difusi Program Keluarga Berencana “Dua Anak Lebih Baik” Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. *E-jurnal Kinesik*

Nirwan.2013. Analisis Implementasi Kebijakan Program Daerah Masyarakat (PDPM) Kecamatan Palu Timur di Kota Palu. Palu : *e-jurnal Katalogis*. Vol 1, No.7.

Setiawati, Elsa.2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli. *e-Jurnal Geo-Tadulako Untad*

SumberLain :

[Http://Rino14.Blogspot.Co.Id/2010/08/Teori-Kependudukan-Dihubungkan-Dengan.Html](http://Rino14.Blogspot.Co.Id/2010/08/Teori-Kependudukan-Dihubungkan-Dengan.Html).

[Http://Tesyatoraya.Blogspot.Co.Id/2010/12/Strategic-Management.Html](http://Tesyatoraya.Blogspot.Co.Id/2010/12/Strategic-Management.Html).

Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/About

Www.Depkes.Go.Id/Artickle/View/17060600002/Kampung-Kb-Inovasi-Strategis-Memberdayakan-Masyarakat.Html

[Https://Kampungkb.Com/?Page_Id=2908](https://Kampungkb.Com/?Page_Id=2908)



DOKUMENTASI WAWANCARA









RIWAYAT HIDUP



M. ASRAR AS, Lahir pada Tanggal 02 Februari 1997 Pekkae, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Anak ke-tujuh dari pasangan suami istri H.M.Asaf Do'a, SH dan Hj. Atiapaika, Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 01 Pekkae , Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di Smp Negeri 1 Tanete Rilau, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di Sma Negeri 1 Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.